

LAPORAN SKRIPSI

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN PEMERINTAH
TERHADAP *AUDIT DELAY***

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2017-2021)**



NARITA SYAVIRA PUTRI RAJASA

18.G1.0206

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

LAPORAN SKRIPSI

PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN PEMERINTAH TERHADAP *AUDIT DELAY*

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2017-2021)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana



NARITA SYAVIRA PUTRI RAJASA

18.G1.0206

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepemilikan pemerintah terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017–2021. Variabel GCG yang diuji meliputi ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Selain itu, ditambahkan variabel kepemilikan pemerintah untuk melihat pengaruhnya terhadap keterlambatan audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan GCG, maka semakin singkat waktu penyelesaian audit, sedangkan dominasi kepemilikan pemerintah justru memperpanjang proses audit. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan, auditor, dan regulator untuk memperkuat mekanisme tata kelola dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.

Kata kunci: *audit delay*, *good corporate governance*, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan pemerintah.